



Article Informations
Corresponding Email:
adamrestu32@gmail.com

Received: 28/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

KEBIJAKAN LUAR NEGERI QATAR PASCA KRISIS DIPLOMATIK TAHUN 2017

Adam Restu Langit

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi kebijakan luar negeri yang dijalankan Qatar setelah krisis diplomatik tahun 2017 untuk mempertahankan kedaulatan serta memperkuat identitas dan posisi regional. Dengan pendekatan kualitatif dan teori konstruktivisme, penelitian ini menganalisis bagaimana Qatar memanfaatkan diplomasi publik, soft power, dan diversifikasi aliansi internasional bersama negara-negara Barat, Turki, dan Iran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon Qatar melalui strategi balancing dapat mengurangi dampak blokade dan meningkatkan pengaruh globalnya di kawasan Timur Tengah

Kata Kunci: kebijakan luar negeri, Qatar, krisis diplomatik, konstruktivisme, soft power, diplomasi publik

Abstract

This study examines Qatar's foreign policy strategies following the 2017 diplomatic crisis, focusing on efforts to maintain sovereignty as well as strengthen identity and regional standing. Employing a qualitative approach and constructivist theory, the research analyzes Qatar's use of public diplomacy, soft power, and diversified international alliances with Western countries, Turkey, and Iran. The results indicate that Qatar's balancing strategies effectively mitigated the blockade's impact and enhanced its global influence in the Middle East region.

Keywords: foreign policy, Qatar, diplomatic crisis, constructivism, soft power, public diplomacy

1. PENDAHULUAN

Qatar adalah negara di semenanjung Arab yang memiliki pengaruh besar di kawasan dengan kebijakan luar negerinya, meski memiliki wilayah geografis yang kecil kekuatan ekonomi yang dimiliki Qatar sangat besar, hal

ini membuat Qatar memiliki bargaining position yang kuat di kawasan regional Timur Tengah, pendapatan utama Qatar berasal dari gas dan minyak bumi¹.

Pertumbuhan Qatar menjadi negara kuat tidak lepas dari revolusi melalui kudeta tahun 1995 ketika Hamad Khalifah Al Thani menggeser posisi Al-Attiyah Al Thani yaitu ayahnya sendiri, Hamad Al Thani berhasil mereformasi Qatar menjadi negara dengan politik dan media yang kuat. Sejak awal tahun 2000an, politik Qatar didasarkan pada *open-door policy* Qatar beberapa kali menjadi mediator netral konflik atau persengketaan², reputasi Qatar pun meningkat pesat dalam level internasional setelah menjadi pusat utama untuk resolusi konflik di kawasan itu. Misalnya di Lebanon, Yaman, Darfur, Libya, Afghanistan, Irak hingga penyanderaan perawat Bulgaria di Libya, kasus Fatah dan Hamas, hubungan antara Sudan dan Chad, dan antara Prancis dan Suriah³.

Kondisi politik di kawasan Timur Tengah memang kurang stabil sebab seringkali negara-negaranya bergesekan satu sama lain ataupun memiliki masalah domestiknya masing-masing seperti pemberontakan atau terorisme. Pada masa pemerintahan Hamad Al-Thani, Qatar mengadopsi pendekatan proaktif dalam menangani ketegangan dan perselisihan di wilayah sekitarnya⁴. Ini bertujuan untuk mencegah ancaman mencapai negaranya dan untuk memastikan keamanan internal dan stabilitas politik.

Qatar memperoleh kekebalan keamanan dan politik dari hubungan yang seimbang dengan pihak-pihak yang dianggap mengancam⁵. Qatar menjalin hubungan dengan Hamas tanpa memutuskan hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi dengan Israel, Qatar juga menjalin hubungan dengan Amerika Serikat sekaligus berkomunikasi dengan Taliban dengan tujuan politik, pada intinya kebijakan proaktif Qatar memang

¹ Rudiany, N. P., & Lubis, F. R. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Qatar untuk Mengakhiri Keanggotaan dalam OPEC pada Tahun 2019. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 103-118.

² Christanti, N. F., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2022). Dampak Open-Door Policy Terhadap Peristiwa Krisis Diplomatik Tahun 2017 Hingga Keluarnya Dari OPEC Tahun 2018. 8, 181–191.

³Nuruzzaman, M. (2015). Qatar and the Arab Spring: Down the foreign policy slope. *Contemporary Arab Affairs*, 8(2), 226-238.

⁴Naier, T., & Altuntaş Çakır, D. R. (2021). Qatar *Soft power*: From Rising to the Crisis. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 43–52.

⁵ *Ibid*.

membuat beberapa pihak terutama negara GCC (*Gulf Cooperation Council*) geram namun terbukti efektif menetralsir ketegangan, termasuk dari kelompok bersenjata seperti Taliban⁶.

Kekuatan Qatar secara politik juga didukung oleh Al-Jazeera, media yang didirikan tahun 1996, media tersebut telah mengubah tujuan, kerangka kerja, dan struktur ruang informasi Arab secara fundamental. Sejak awal, Al-Jazeera mengangkat slogan-slogan seperti kemerdekaan dan netralitas⁷.

Dipandang sebagai salah satu negara Arab terkuat, kebijakan luar negeri Qatar sering menimbulkan kontroversi, peran aktif diplomasi Qatar ini telah menciptakan persaingan dengan kekuatan tradisional di kawasan seperti Mesir dan Arab Saudi dan Negara anggota GCC lainnya. Ini telah menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka, dan Qatar telah menerima banyak tuduhan, seperti campur tangan dalam urusan internal negara. Jangkauan Al-Jazeera yang terlalu luas juga menimbulkan implikasi negatif bagi hubungan Qatar dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Qatar telah menerima banyak tuduhan, sebagian besar tentang campur tangan Al-Jazeera dalam urusan internal negara-negara tetangga dan menjadi wadah utama penentang rezim Arab untuk mengkritik penguasanya.

Krisis diplomatik terjadi pada tahun 2017, Arab Kuartet yang berisikan Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dengan pencabutan kedutaan, Arab Kuartet menuduh Qatar memiliki hubungan erat dengan organisasi ekstremis seperti Ikhwanul Muslimin, Al Qaeda, kedekatan ini dianggap akan merusak stabilitas Kawasan regional Timur Tengah, selain faktor tersebut kedekatan Qatar dengan Iran dan tragedi *arab spring* juga merupakan penyebab Qatar dimusuhi negara Arab Kuartet.

Banyak analisis memandang kedekatan Qatar dengan Iran sebagai penyebab utama terjadinya krisis diplomatik ini. Iran dianggap sebagai negara yang mengancam keamanan Timur Tengah, bahkan dunia. Selama bertahun-tahun, Qatar terlihat menjaga hubungan baiknya dengan Iran. Hal ini salah satunya terlihat dari penolakan Qatar dalam Joint Comprehensive

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Plan of Action (Kesepakatan Nuklir Iran) oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 2015. Selain itu, pada pemilihan presiden Iran tahun 2017, Sheikh Hamad, pemimpin Qatar, turut pula memberi selamat kepada Hassan Rouhani yang terpilih kembali atas kemenangannya sebagai presiden Iran. Namun, puncak dari kemarahan Arab Quartet sebetulnya diakibatkan oleh pemerintah Qatar yang mengesahkan pembayaran \$700 juta untuk kelompok Hizbullah, partai politik dan milisi Syiah yang didukung Iran di Irak, sebagai imbalan atas kebebasan anggota keluarga kerajaan Qatar yang ditawan di Irak pada April 2017⁸.

Arab Kuartet secara tegas memboikot Qatar, mereka melakukan blokade melalui jalur udara maupun laut yang semakin menambah krisis diplomatik di Qatar, blokade ini menyebabkan turunnya ketersediaan pangan di Qatar, karena distribusi pangan di Qatar harus terlebih dahulu melewati Arab Saudi, sekitar bulan Juni 2017 Arab Kuartet menyatakan bersedia membuka kembali hubungan diplomatik dengan Qatar hanya jika Qatar memenuhi 13 ultimatum dari negara Arab Kuartet, ultimatum ini dilayangkan dengan Kuwait sebagai Mediator⁹.

Qatar menolak semua ultimatum yang diberikan Arab Kuartet, sebab ultimatum tersebut dianggap tidak berdasar dan melanggar hak Qatar sebagai negara berdaulat, penolakan ini membuat Arab Kuartet melakukan propaganda Anti-Qatar, propaganda ini dilakukan melalui media massa dan media sosial dengan tujuan memperburuk citra Qatar sebagai negara yang mendukung terorisme, penggiringan opini publik yang gencar membuat publik pro dan kontra.

Untuk menangani krisis diplomatik, Qatar melancarkan strategi kebijakan luar negeri yang berfokus untuk memulihkan citra dari tuduhan rivalnya di kawasan dan menempatkan kembali Qatar sebagai aktor vital di kawasan timur tengah. Kebijakan Qatar masih berbasis pada *Open-door Policy* yang pertama kali dicetuskan Hamad Al-Thani, namun di era Tamim

⁸ Gordon, P., Yadlin, A., & Heistein, A. (2017). The Qatar Crisis : Causes , Implications , Risks , and the Need for Compromise. *Institute for National Security Studies Special Publication*, 13(June), 0-6.

⁹ *Ibid.*

Al-Thani kebijakan ini disempurnakan terutama setelah krisis diplomatik dengan mengacu pada prinsip independent progresif.

2. PEMBAHASAN

Pasca krisis diplomatik 2017 yang dipicu blokade Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir, Qatar menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kedaulatan, stabilitas, serta citra internasionalnya. Krisis ini pada awalnya menyebabkan terganggunya rantai pasokan pangan, disrupsi ekonomi, hingga tekanan politik di tingkat regional. Namun, alih-alih tunduk pada tuntutan 13 poin ultimatum yang dinilai melanggar kedaulatan, Qatar memilih untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang lebih independen dan progresif. Dengan perspektif *Balance of Threat* Stephen Walt, Qatar memandang blokade bukan hanya ancaman material, tetapi juga ancaman terhadap identitas dan keberadaannya sebagai negara berdaulat. Hal ini mendorong Doha mengadopsi strategi *balancing* baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi *external balancing*, Qatar memperkuat hubungan dengan Turki dan Iran yang kemudian memberi dukungan politik, militer, dan logistik, sekaligus tetap menjaga relasi erat dengan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya demi menciptakan efek jera terhadap para pemboikot. Dari sisi *internal balancing*, Qatar melaksanakan diversifikasi ekonomi, memperkuat ketahanan pangan melalui investasi besar di sektor pertanian modern dan industri substitusi impor, serta melakukan modernisasi militer dengan akuisisi alutsista canggih. Langkah ini menjadikan blokade yang semula dimaksudkan untuk melemahkan justru menjadi momentum konsolidasi nasional. Dari perspektif konstruktivisme Wendt, krisis ini juga menjadi arena rekonstruksi identitas internasional Qatar. Identitas lama yang dilekatkan oleh blokade sebagai “penyokong terorisme” dilawan dengan narasi baru melalui diplomasi publik, budaya, olahraga, dan kemanusiaan. Misalnya, melalui Al Jazeera, Qatar terus menegaskan dirinya sebagai negara independen dengan visi global; melalui penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022 dan pembangunan Museum Nasional Qatar, Doha menggunakan diplomasi budaya dan olahraga sebagai *soft power* untuk memperkuat citra

sebagai aktor modern, progresif, dan terbuka; sementara diplomasi kemanusiaan memperlihatkan peran Qatar dalam krisis-krisis global. Strategi ini terbukti menggeser citra Qatar dari *troublemaker* menjadi mediator yang dapat dipercaya dalam isu-isu internasional. Pada akhirnya, transformasi kebijakan luar negeri ini bukan hanya berhasil mengurangi dampak blokade, tetapi juga meningkatkan posisi tawar dan pengaruh global Qatar di Timur Tengah, menjadikannya aktor yang lebih kompetitif dalam sistem internasional yang kian multipolar

3. KESIMPULAN

Krisis diplomatik 2017 menjadi titik balik penting bagi arah kebijakan luar negeri Qatar. Blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir tidak hanya dianggap sebagai ancaman material, tetapi juga sebagai serangan terhadap kedaulatan, keamanan, serta identitas nasional Qatar. Merespons hal tersebut, Qatar melakukan transformasi kebijakan yang progresif dengan mengadopsi strategi *balancing* baik internal maupun eksternal. Melalui konsep *balance of threat*, Qatar memaknai ancaman bukan sekadar kekuatan militer, melainkan juga niat agresif, kedekatan geografis, serta kapabilitas ofensif negara pemboikot. Strategi eksternal dijalankan dengan mempererat hubungan dengan Turki, Iran, dan tetap menjaga aliansi dengan Amerika Serikat serta mitra Barat lainnya, sementara strategi internal difokuskan pada diversifikasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, dan modernisasi militer. Pada saat yang sama, konstruktivisme Wendt membantu menjelaskan bagaimana Qatar merekonstruksi identitasnya melalui diplomasi publik, budaya, dan *soft power*—terutama lewat Al Jazeera, diplomasi olahraga, serta keterlibatan dalam isu kemanusiaan—untuk melawan stigma sebagai negara penyokong terorisme. Transformasi ini tidak hanya memulihkan citra internasional Qatar, tetapi juga menggeser struktur relasi regional dari dominasi hegemoni Saudi menuju tatanan yang lebih kompetitif. Dengan demikian, krisis yang semula dimaksudkan untuk melemahkan Qatar justru menghasilkan penguatan posisi, kemandirian, serta peningkatan pengaruh globalnya di Timur Tengah.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Christanti, N. F., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2022). Dampak *Open-Door Policy* terhadap peristiwa krisis diplomatik tahun 2017 hingga keluarnya dari OPEC tahun 2018. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8, 181–191.
- Gordon, P., Yadlin, A., & Heistein, A. (2017). *The Qatar crisis: Causes, implications, risks, and the need for compromise*. Institute for National Security Studies Special Publication, 13(June), 0–6.
- Naier, T., & Altuntaş Çakır, D. R. (2021). Qatar soft power: *From rising to the crisis*. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 43–52.
- Nuruzzaman, M. (2015). Qatar and the Arab Spring: Down the foreign policy slope. *Contemporary Arab Affairs*, 8(2), 226–238.
- Rudiany, N. P., & Lubis, F. R. (2020). Analisis kebijakan luar negeri Qatar untuk mengakhiri keanggotaan dalam OPEC pada tahun 2019. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 103–118.